

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah data realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang tersedia pada *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. Periode tahun tersebut dipilih karena, pada tahun tersebut banyak terdapat praktik politik dinasti di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang kepemimpinan daerahnya terindikasi menjalankan praktik politik dinasti.

B. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data daerah terindikasi politik dinasti didapatkan dari data hubungan kekeluargaan dalam jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI di media massa dan dirangkum secara manual oleh peneliti. Data desentralisasi fiskal bersumber dari data ringkasan anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan. Penelitian ini juga menggunakan data opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan dan diunduh dari *website* BPK RI (www.bpk.go.id). Data mengenai jumlah pelanggaran SPI diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh langsung

dari BPK RI. Selain itu, penelitian ini menggunakan data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Pola pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode tahun 2013 - 2015. Populasi dapat dijadikan sebagai sampel ketika memenuhi kriteria- kriteria berikut ini:

- 1) Sampel merupakan pemerintah daerah yang terindikasi politik dinasti berdasarkan data Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2013-2015.
- 2) Pemerintah yang laporan anggarannya tersedia di website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2013-2015.
- 3) Pemerintah daerah yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK tahun 2013-2015.
- 4) Pemerintah daerah yang masuk dalam data Keputusan Kemendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2013-2015.
- 5) Sampel pembanding merupakan pemerintah daerah yang tidak terindikasi politik dinasti dan berada dalam satu wilayah dengan daerah yang terindikasi politik dinasti serta memenuhi kriteria 1, 2, 3,

dan 4. Dengan pembandingan yang digunakan adalah 1:1, yaitu jumlah sampel pembandingan sama dengan jumlah sampel kasus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen dari instansi yang bersangkutan.

E. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan setiap kegiatan atau aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Fontanella dan Rossieta, 2014). Opini audit dalam penelitian ini akan diukur dengan skala ordinal yang menunjukkan tingkatan atau peringkat mulai dari opini paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a) 1= Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

- b) 2= Tidak Wajar (TW)
- c) 3= Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- d) 4= Wajar Tanpa Pengecupalian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
- e) 5= Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

b. Variabel Independen

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, dan jumlah pelanggaran sitem pengendalian internal.

a) Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah suatu kondisi dimana daerah mampu secara mandiri membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pihak yang telah membayar pajak serta retribusi yang menjadi sumber keuangan daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Dalam penelitian ini, variabel kemandirian daerah diukur menggunakan rasio kemandirian daerah, dengan rumus:

$$\text{Kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

b) Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar (2016), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur dengan penjumlahan Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$\text{Ketergantungan pada Pemerintah Pusat} = \frac{\text{DAU} + \text{DAK}}{\text{Total Pendapatan}}$$

c) Efektivitas Keuangan

Efektivitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah (Dwirandra, 2008). Rasio efektivitas diperoleh melalui rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Telah Ditetapkan}}$$

Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas yang ditunjukkan dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	≤60

d) Politik Dinasti

Politik dinasti adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Variable ini diukur menggunakan variabel *dummy* seperti dalam penelitian Nuritomo dan Rossieta (2014). Skor “1” untuk daerah yang terindikasi menjalankan politik dinasti pada kepala daerah dan wakil kepala daerah serta “0” untuk daerah yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti. Data masa jabatan dan informasi status hubungan kepemimpinan kepala daerah diperoleh dari laporan yang diterbitkan Kemendagri tahun 2015.

e) Jumlah Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPK, kelemahan pada sistem pengendalian internal atas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga aspek, antara lain; kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian internal. Berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh BPK, banyaknya jumlah kelemahan sistem pengendalian internal dapat dilihat dari temuan/kasus yang terjadi terkait sistem pengendalian internal yang dikeluarkan oleh BPK. SPI diukur dengan menggunakan jumlah kasus kelemahan SPI tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang terdapat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI.

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Kinerja merupakan sebuah capaian organisasi dalam menjalankan seluruh tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah merupakan capaian/prestasi yang diperoleh dari menjalankan tugas pelayanan dan mencapai tujuan organisasi. Ukuran kinerja penyelenggaran pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri RI. Unit analisis pada penelitian ini berdasarkan periodisasi tahun kepemimpinan kepala daerah. Dalam rentang nilai 0-4, skor kinerja dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:

- a) Skor 0 – 1 = Rendah
- b) Skor 1 – 2 = Sedang
- c) Skor 2 – 3 = Tinggi
- d) Skor 3 – 4 = Sangat Tinggi

F. Uji Kualitas Instrumen

1. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai jumlah data, nilai maksimum dan minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai simpangan baku (*standart deviation*) untuk variabel dependen, variabel independen, dan variabel pemoderasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi mensyaratkan untuk dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa persamaan regresi telah terbebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik sendiri meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Pengujian normalitas residual data dapat dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test (K-S)* dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*, yang mana residual data dapat dikatakan berdistribusi normal jika tingkat signifikansi $> 0,05$.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah *time series*, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu (Santoso, 2010). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi yaitu dengan pengujian *Durbin-Watson* (Uji D-W).

Menurut Santoso (2010), pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut:

1. Angka D-W di bawah -2, artinya terdapat autokorelasi positif.
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2, artinya tidak terdapat autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2, artinya terdapat autokorelasi negatif.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk memastikan apakah dalam suatu model regresi terdapat interkorelasi atau kolinieritas antar variabel bebasnya (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Untuk menguji adanya multikolinieritas yaitu dengan cara menganalisis korelasi antar variabel dengan melihat nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dapat dikatakan tidak terdapat multikolinieritas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dalam suatu model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji *Spearmans' rho*, dimana suatu variabel dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas ketika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$ (Priyatno, 2010).

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi. Penelitian ini memiliki delapan hipotesis yang akan dianalisis dengan dua model persamaan. Model persamaan pertama untuk menguji H_1 , H_2 , H_3 , H_4 dan H_5 diuji dengan analisis regresi berganda, sedangkan model persamaan kedua untuk menguji hipotesis H_6 , H_7 dan H_8 diuji menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Untuk menguji H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , dan H_5 dijelaskan melalui persamaan pertama berikut ini:

$$AK = \alpha + \beta_1.KD + \beta_2.KP + \beta_3.EK + \beta_4.PD + \beta_5.SPI + \beta_6.KK + e$$

Selanjutnya, untuk menguji H_6 , H_7 , dan H_8 dijelaskan melalui persamaan kedua berikut ini:

$$AK = \alpha + \beta_1.KD + \beta_2.KP + \beta_3.EK + \beta_4.PD + \beta_5.SPI + \beta_6.KK * KD + \beta_7.KK * KP + \beta_8.KK * PD + e$$

Keterangan:

AK = Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

KD = Kemandirian Daerah

KP = Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

EK = Efektivitas Keuangan

PD = *Dummy* Politik Dinasti (0= daerah tidak terindikasi politik dinasti; 1= daerah terindikasi politik dinasti)

SPI = Jumlah Pelanggaran Sistem Pengendalian Internal

- KK = Kinerja
- α = Konstanta
- β_{1-6} = Koefisien Regresi
- e = Error

2. Uji Analisis Data

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dalam analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Dalam uji F, variabel independen dinyatakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketika nilai signifikansi $< \alpha$ 0,05.

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai *R Square* pada tabel *Model Summary* merupakan nilai yang menunjukkan persentase kecocokan model, atau nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2019).

c. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan signifikansi nilai α

0,05. Suatu hipotesis akan terdukung apabila nilai $\text{sig} < \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.